

	News Title : Pemerintah Ajak Pelaku Usaha Aktif Bertransaksi di Bursa CPO Indonesia	
	Media Name : majalahhortus.com	Journalist : -
	Publish Date : 06 July 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Fajar Wibhiyadi (Direktur Utama ICDX), Manumpak Manurung (Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Sawit	Topic : Bursa CPO

Home > Sawit > Pemerintah Ajak Pelaku Usaha Aktif Bertransaksi di Bursa CPO Indonesia

Pemerintah Ajak Pelaku Usaha Aktif Bertransaksi di Bursa CPO Indonesia

July 6, 2024 01:06



Logo Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) (Foto:Mayank Sharma)

Pemerintah mendorong pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (CPO) untuk lebih aktif bertransaksi di Bursa CPO Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memastikan harga yang transparan serta adil bagi semua pihak.

Demiikian disampaikan Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kasan, pada acara "Liberalisasi Bursa CPO Indonesia" di Pontianak pada Kamis (4/7).

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Fajar Wibhiyadi, dan perwakilan dari Indonesia Commodity Users (ICU), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

Dengan aktif bertransaksi di Bursa CPO Indonesia ini akan mendukung kestabilan harga TIS dan Modisul serta mempositifkan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.

"Untuk itu, kami mengajak pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan Barat, untuk aktif bertransaksi dan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia sebagai acuan," ujar Kasan.

Kasan juga menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membantu harga acuan yang dapat digunakan untuk mendukung perdagangan harga TIS oleh Kementerian Pertanian, serta membuat harga acuan Modisul yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih akurat. Harga acuan yang terakumulasi dapat digunakan sebagai patokan harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO.

"Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi acuan untuk penetapan harga TIS dan Modisul. Kami berharap Kementerian Pertanian mendukung penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TIS," tambah Kasan.

Kasan juga menyampaikan, saat ini Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO baik secara Real maupun Futures. Nilai transaksi Futures CPO di Bursa CPO Indonesia mencapai Rp 350 miliar, setara dengan 60 juta ton setara Januari-Juni 2024, sebanyak 23 pelaku usaha telah menjadi anggota aktif di Bursa CPO Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor perdagangan Indonesia bernilai monetisasi surplus sebesar 4,6 bulan berturut-turut hingga Mei 2024, dengan nilai mencapai USD 1,93 miliar. Nilai ini meningkat 7,7 persen (60M) dibandingkan dengan April 2024, yang mencapai USD 1,78 miliar.

"Saat ini, dari beberapa penampung surplus negara perdagangan pada Mei 2024, adalah nilai ekspor komoditas yang mencapai USD 1,46 miliar. Nilai ekspor komoditas tersebut dibayar oleh nilai ekspor CPO sebesar USD 1,05 miliar," ungkap Kasan.

Sementara Bappebti, Chy Andrianita, menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan Bursa CPO adalah untuk mempositifkan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.

Dia berharap Bursa CPO Indonesia dapat membantu harga CPO yang dapat dijadikan acuan bagi di pasar domestik maupun internasional, dengan harga yang diperoleh secara transparan, adil, dan real-time.

Chy menambahkan, bahwa Bursa CPO Indonesia didirikan berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah dimodifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Pemerintah Bappebti (Tebte) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Hasil Mineral Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Pertanian Tawar Tertutup (PTT) digunakan sebagai pedoman teknis dalam operasinya.

"Kejelasan perdagangan CPO melalui Bursa CPO Indonesia berifat terbuka untuk pasar dalam negeri. Namun, kami yakin dapat mendukung pengakuan ekspor komoditas CPO di pasar global," tambah Chy.

Direktur Utama ICDX, Fajar Wibhiyadi, menyoroti pentingnya untuk terus menyebarkan manfaat dari adanya Bursa CPO Indonesia kepada semua pelaku usaha CPO. ICDX berkolaborasi dengan berbagai penampung kepentingan untuk memberikan literasi kepada pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia.

"Kejelasan literasi ini sejalan dengan program edukasi berkolaborasi yang kami jalankan untuk implementasi Bursa CPO di Indonesia. Kami berharap para pelaku usaha hingga small di Indonesia, khususnya di Pontianak, dapat memahami manfaat dan mekanisme transaksi perdagangan CPO melalui Bursa, sehingga semakin banyak yang terlibat dalam bertransaksi CPO di Bursa," ujar Fajar.

Kepala Bidang Perdagangan dan Promosi GAPKI, Manumpak Manurung, berharap agar anggota GAPKI turut aktif dalam bertransaksi dan menjadi anggota Bursa. Hal ini diharapkan dapat membantu penetapan harga TIS dan CPO di dalam Bursa.

"Kalimantan Barat merupakan salah satu produsen CPO terbesar kedua setelah Riau. Namun, belum banyak pelaku usaha yang berperan aktif dalam monetisasi harga di Bursa CPO Indonesia. Kami berharap anggota GAPKI aktif dalam bertransaksi agar ikut monetisasi harga TIS dan CPO di Bursa," ungkap Manurung.

Kepala Bidang UKM dan Hubungan Internasional DPP APKASINDO, Olyo Alvin Buchan, menjelaskan keberadaan Bursa CPO di Indonesia. Sejalan dengan Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit, karena TIS yang dihasilkan merupakan patokan harga dari CPO.

Penetapan harga TIS diharapkan dapat lebih cepat dan transparan dengan mengacu pada harga acuan CPO di Bursa.

"Seperti adanya Bursa CPO Indonesia, harga TIS terus menunjukkan kestabilan. Hal ini tentu menjadi harapan bagi para petani kelapa sawit," terang Olyo.

Olyo juga menyebut pentingnya Bursa CPO Indonesia dalam memfasilitasi perdagangan Bursa melalui nilai harga small (dan kecil dan PPO), karena PPO juga mempengaruhi harga TIS. Dia juga berharap Bursa ini dapat menjadikan petani kelapa sawit sebagai mitra strategis dalam pengakuan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia.

Untuk diketahui, literasi Bursa CPO di Pontianak yang bertema "Kupas Tuntas Bursa CPO Indonesia" merupakan kegiatan literasi keempat yang dilaksanakan Bappebti tahun ini.

Sementara itu, tiga kota sebelumnya yang menjadi tuan rumah dalam kegiatan literasi serupa adalah Jakarta, Medan, dan Palembang.